

Pola dan Prilaku Konsumsi Masyarakat Muslim di Provinsi Jambi (Telaah Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Keimanan)

Amri Amir

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Abstract.

This research aims to: 1) determine the characteristics and patterns of consumption of the Muslim community in Jambi Province is based on the type of work, education, income and the level of Iman; 2) relationship between type of work, education, income and level of Iman towards food consumption and for religious. The data used are primary data. The number of samples as 150 Muslim households by the "purposive random sampling", taking into account the allocation of the sample based on the status and social organization that followed. Data analysis using cross table and Chi-Square test. The results of this research: 1) The proportion of food consumption Muslim community for food at 43.48%, while for non-food needs reached 56.52%. 2). The proportion of spending on religious amounted to 28.08% of non-food expenditure, or 15.87% of the total expenditure. 3) There is a close link between type of work, education, income and level of religiosity with food and non food expenditure. The higher the education, income and Iman, then the food expenditure is lower. 4). The link between this type of work, education, income and the level of Iman related closely with the expenses of the religious. The higher the level of education, income and Iman, then the expenditure for the religious tend to be higher.

Keywords: consumption patterns, food, non-food, and religious.

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) karakteristik dan pola konsumsi masyarakat Muslim di Provinsi Jambi berdasarkan jenis pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan; 2) hubungan antara jenis pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan terhadap konsumsi makanan dan untuk pengeluaran keagamaan. Data yang digunakan adalah data primer. Jumlah sampel sebanyak 150 rumah tangga Muslim dengan metode "purposive random sampling", berdasarkan status dan organisasi sosial yang diikuti. Analisis data menggunakan tabel silang dan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proporsi konsumsi pangan masyarakat Muslim untuk makanan di 43,48%, sedangkan untuk kebutuhan non-makanan mencapai 56,52%. 2). Proporsi pengeluaran untuk keagamaan sebesar 28,08% dari pengeluaran non-makanan, atau 15,87% dari total belanja. 3) Terdapat hubungan erat antara jenis pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan dengan pengeluaran makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan, semakin rendah pengeluaran untuk makanan. 4). Terdapat hubungan erat antara jenis pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan dengan pengeluaran untuk keagamaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan, semakin tinggi pengeluaran untuk keagamaan.

Kata Kunci: pola konsumsi, makanan, non-makanan, tingkat keimanan

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi konvensional (kapitalis), manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), sedangkan dalam ekonomi Islam manusia dikenal dengan makhluk Islami atau *homo Islamicus*, sebagai substitusi dari *homo economicus*. Dalam *homo economicus*, manusia dianggap makhluk yang selalu ingin memuaskan nafsunya sepuas-puasnya (*memaksimalkan utilitas-nya*) yang tidak ada habis-habisnya, sedangkan dalam *homo Islamicus*, manusia dibolehkan untuk memenuhi kebutuhannya dan nafsunya akan barang dan jasa tetapi mereka harus dapat mengendalikannya.

Menyangkut kebutuhan/konsumsi, maka dalam pemenuhannya dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan (Abdul Mannan. 1997), yaitu: *daruriyyat* (kebutuhan minimum), *hajiyyat* (kebutuhan yang mencukupi) dan *tahsiniyat* (kebutuhan yang menyenangkan). Dalam ekonomi Islam semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan merupakan ibadah, termasuk konsumsi.

Didasarkan atas penjelasan di atas maka *konsumsi* dalam ekonomi Islam dapat diartikan sebagai *pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah)*. Dalam melakukan konsumsi maka perilaku konsumen terutama Muslim, selalu dan harus didasarkan pada Syariah Islam. Ada tiga prinsip dasar perilaku konsumsi Muslim (Syarif Chaudhry. 2012) yaitu halal, baik dan sederhana.

Barang dan jasa yang dapat dan boleh dikonsumsi maupun diproduksi oleh umat Islam adalah barang atau jasa yang *halal, bermanfaat dan baik (halalan toyibaan)* baik menyangkut zatnya maupun dalam proses mendapatkannya serta *hemat dan tidak berlebih-lebihan atau boros* (secukupnya) dalam memenuhinya. Sehubungan dengan *halalan toyiban* ini, maka sesuatu barang atau jasa dianggap *halal dan toyib* jika dalam memenuhinya atau mendapatkannya tidak melanggar syariah Islam.

Tujuan pengeluaran atau konsumsi dalam Islam tidak semata-mata untuk memuaskan nafsunya semata (*memaksimalkan utilitas-nya/maximize utility*) seperti yang dinyatakan dalam teori ekonomi konvensional (kapitalis). Mengonsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memaksimalkan *maslahah*, yaitu memaksimalkan kebaikan dan berkah. *Maximum Utility* merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa menjadi kontradiktif dengan kepentingan orang lain. Sedangkan *maslahah* adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain, sedangkan berkah manfaat yang diterima di dunia dan di akhirat.

Dalam Islam, semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan merupakan ibadah, termasuk konsumsi. Karena itu menurut Yusuf Qardhawi (1997), dalam melakukan konsumsi, maka konsumsi tersebut harus dilakukan pada *barang yang halal dan baik (halalan toyibban)* dengan cara berhemat (*saving*), berinfak (*mashlahat*) serta menjauhi *judi, khamar, gharar dan spekulasi*. Ini berarti bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan manusia (terutama Muslim) harus menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubaziran dan menghindari hutang. Konsumsi yang halal itu adalah konsumsi terhadap barang yang halal, dengan proses yang halal dan cara yang halal, sehingga akan diperoleh manfaat dan berkah.

Selanjutnya, secara teoritis, faktor-faktor yang menentukan pola konsumsi keluarga antara lain (Keynes. 1964); tingkat pendapatan keluarga, ukuran keluarga, dan pendidikan. Sedangkan, menurut ekonomi Islam, selain ditentukan oleh pendapatan, jumlah keluarga dan pendidikan juga ditentukan oleh tingkat keimanan. Hukum

Engel's (Engel law) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga semakin rendah proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan. Berdasarkan teori klasik ini, maka keluarga bisa dikatakan lebih sejahtera bila proporsi pengeluaran untuk pangan jauh lebih kecil dari proporsi pengeluaran untuk non pangan. Artinya proporsi alokasi pengeluaran untuk pangan akan semakin kecil dengan bertambahnya pendapatan keluarga, karena sebagian besar dari pendapatan tersebut dialokasikan pada kebutuhan non pangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) karakteristik keimanan keluarga (penduduk) Muslim berdasarkan pekerjaan, pendidikan dan tingkat pendapatan di Provinsi Jambi; 2) Pola pengeluaran untuk konsumsi pangan dan kebutuhan keagamaan berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan masyarakat Muslim di Provinsi Jambi; 3) Pola konsumsi dan pendapatan keluarga Muslim pada masing – masing kelompok pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan Provinsi Jambi; 4) keterkaitan antara pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan terhadap pengeluaran untuk keagamaan.

METODE

Data

Data utama yang akan digunakan adalah data primer. Data primer yang digunakan terdiri dari dua kelompok data yaitu:

- a. Data pada tingkat individu kepala keluarga yang mencakup pekerjaan, pendidikan, pendapatan, keimanan dan pengeluaran untuk pangan, non pangan dan untuk keagamaan masing-masing kepala keluarga.
- b. Data pada tingkat rumah tangga yang mencakup pola konsumsi, pengeluaran dan pendapatan rumah tangga dan keimanan serta pengeluaran untuk kepentingan keagamaan.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga Muslim berdasarkan status dalam masyarakat, sedangkan populasi sasaran dalam studi ini seluruh rumah tangga Muslim dari jenis status tersebut yang berada di daerah yang diteliti. Mengingat banyaknya jumlah populasi sasaran, dengan keterbatasan dana dan jangka waktu studi, maka pengamatan hanya akan dilakukan terhadap sampel populasi sasaran. Jumlah sampel (*sampling fraction*) ditetapkan sebanyak 150 rumah tangga Muslim. Penarikan sampel dilakukan dengan metode "purposive random sampling", dengan mempertimbangkan alokasi sampel berdasarkan unsur masyarakat. Sampel masing-masing lokasi berdasarkan kecamatan dan kriteria masyarakat sebagai berikut:

Tabel. 1. Distribusi Sampel Rumah Tangga Muslim di Jambi

Kab/Kecamatan	Status Responden				Total
	Umum	Ormas Islam	Dai/Imam	PNS	
Tanjababar/Kuala Tungkal	5	10	10	5	30
Bungo/Rimbo Bujang	7	8	10	5	30
Sungai Penuh	5	10	5	10	30
Tanjabt看/Muara Sabak	10	5	10	5	30
Kota Jambi/Telanaipura	5	10	10	5	30
Jumlah	32	43	45	30	150

Analisis Data

Baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan metode analisis deskriptif analitik. Khusus untuk data primer, terlebih dahulu dilakukan pembobotan (*scoring*) terhadap item-item pengamatan dan pertanyaan. Selanjutnya dengan bantuan tabel-tabel tunggal dan tabel-tabel silang akan dianalisis besaran, frekuensi dan persentase dari variabel-variabel yang diteliti dan diamati. Selain analisis tabel silang, juga digunakan uji *Pearson Chi-Square*. Uji ini terutama digunakan untuk melihat keterkaitan antara faktor-faktor sosial-ekonomi-budaya terhadap pendapatan dan pola konsumsi rumah tangga muslim.

Pengukuran Variabel

Variabel utama dalam penelitian diukur dengan berbagai cara. Pengukuran variabel utama adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan diukur dalam rupiah yang diperoleh selama satu bulan
- b. Pengeluaran diukur dengan jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk kepentingan pangan dan non pangan. Untuk non pangan meliputi biaya pendidikan, kesehatan, rekreasi dan keagamaan (zakat, sedekah, infak wakaf dan kurban).
- c. Pola konsumsi dirinci menurut jenis pengeluaran untuk pangan, non pangan dalam kategori rendah, sedang dan tinggi.
- d. Pendidikan diukur dari tingkat pendidikan yang pernah diikuti (lama pendidikan).
- e. Tingkat keimanan diukur dengan melihat banyaknya aktivitas keagamaan yang dilaksanakan dengan memberikan *scoring* dan dirinci menurut kategori rendah, sedang dan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Rumah Tangga Muslim

Profesi

Kelompok utama dari kepala rumah tangga Muslim yang diteliti adalah orang yang mempunyai profesi sebagai Dai dan Imam atau *mubaligh* yaitu sebanyak 50 orang atau 33,3 persen dari jumlah responden keseluruhan. Urutan kedua kelompok rumah tangga Muslim adalah berasal dari Organisasi Masyarakat Islam (Ormas Islam) seperti Pengurus/anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Muhammadiyah, Pengurus Mesjid dan Organisasi Keagamaan lainnya. Rumah tangga Muslim yang berasal dari Organisasi Keagamaan ini berjumlah 38 orang atau 25,3 persen. Selanjutnya rumah tangga yang berasal dari masyarakat umum berjumlah 37 orang atau 24,7 persen. Sedangkan rumah tangga yang berasal dari aparat pemerintah atau yang berprofesi sebagai PNS berjumlah 25 orang atau 16,7 persen.

Pekerjaan

Lapangan pekerjaan responden tidak terlalu bervariasi. Pekerjaan yang terbesar dari responden adalah sebagai pegawai negeri dengan jumlah mencapai 45 orang atau mencapai 30 % dari total responden. Urutan kedua pekerjaan rumah tangga Muslim yang dijadikan responden adalah petani dengan jumlah 40 orang atau 26,7 persen. Urutan ketiga pekerjaan rumah tangga Muslim yang dijadikan responden adalah sebagai karyawan swasta dengan jumlah 34 orang atau sebesar 22,7 persen.

Pekerjaan sebagai pedagang dari rumah tangga Muslim sebagai responden sebanyak 18 orang atau mencapai 12,0 persen dari seluruh responden. Sedangkan sebagai pensiunan sebanyak 5 orang atau 3,3 persen. Selanjutnya pekerjaan sebagai

wiraswasta ada 5 orang (3,3 persen) dan pekerjaan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya hanya 3 orang atau 2 persen.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam berbagai hal bidang kehidupan, termasuk dalam memilih barang atau jasa untuk digunakan/dikonsumsi. Semakin tinggi pendidikan kepala keluarga maka akan semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan.

Tingkat pendidikan seseorang atau kepala rumah tangga suatu keluarga dapat merubah sikap dan perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga bahwa tingkat pendidikan seseorang akan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil dalam setiap persoalan, baik untuk kepentingan dunia maupun untuk kepentingan akhirat. Dari berbagai hasil survei dan penelitian ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga, maka semakin kecil persentase pengeluaran untuk konsumsi pangan

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa, tingkat pendidikan rumah tangga Muslim yang menjadi responden sebagian besar (66 persen) adalah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ke atas. Dari 66 persen yang berpendidikan SLTA ke atas tersebut diantaranya berpendidikan SMA/SMU sebesar 38,1 persen. Kepala Keluarga Muslim yang berpendidikan akademi (D3 sampai S3) berjumlah 51 orang atau 35 persen.

Kegiatan Keagamaan dan Keimanan

Kegiatan keagamaan suatu rumah tangga akan berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan mereka, termasuk dalam hal ini perilaku konsumsi. Kegiatan keagamaan keluarga Muslim di daerah penelitian ini didasarkan pada hanya pada haji, umrah dan kegiatan keagamaan lain yang pernah diikuti. Didasarkan pada kegiatan haji, hanya 16 orang atau 10,67 persen rumah tangga Muslim yang diteliti yang pernah melaksanakan haji. Rumah tangga muslim yang pernah melakukan kegiatan umrah dari total rumah tangga yang diteliti, hanya sebanyak 12 orang atau 8 persen.

Kegiatan keagamaan lainnya yang cukup penting adalah mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan lain seperti hadir dalam hari-hari besar Islam. Jumlah rumah tangga yang sering mengikuti acara-acara keagamaan yang diadakan adalah 140 orang atau sekitar 93,33 persen. Rumah tangga Muslim yang mengikuti kegiatan pembacaan Surah Yasin dan Al Qur'an pada malam jumat 85,33 persen, sedangkan rumah tangga yang melaksanakan qurban 58 persen. Selanjutnya yang mengikuti kegiatan sholat berjamaah mencapai 50,67 persen dan menjalankan puasa ramadhan 50, 67 persen serta menjalankan puasa sunnah sebanyak 64,66 persen.

Dari jumlah data yang ada, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Muslim yang tergolong mempunyai keimanan sedang sekitar 61,3 persen sedangkan rumah tangga Muslim yang tergolong mempunyai tingkat keimanan tinggi sebanyak 21,3 persen. Sisanya sebesar 17,4 persen tergolong pada rumah tangga Muslim yang mempunyai tingkat keimanan rendah.

Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga/keluarga. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga

yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan atau konsumsi jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pola konsumsi rumah tangga pada dasarnya dapat dikelompokkan atas tiga kelompok (Akmal 2005) yaitu:

- a. Kategori rendah, apabila alokasi untuk konsumsi pangan kurang dari 50 % dari total pengeluaran.
- b. Kategori sedang, apabila alokasi untuk konsumsi pangan sebanyak 50 - 60 % dari total pengeluaran.
- c. Kategori tinggi, apabila alokasi untuk konsumsi pangan lebih besar 60 % dari total pengeluaran.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa secara rata-rata konsumsi pangan rumah tangga Muslim di Provinsi Jambi mencapai proporsi 43,48 persen dari total pengeluaran. Dibandingkan dengan kategori di atas, maka alokasi pengeluaran masyarakat Muslim di Provinsi Jambi tergolong rendah. Sedangkan pengeluaran untuk non-makanan mencapai 56,52 persen dan ini tergolong tinggi. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga Muslim di Provinsi Jambi tergolong baik atau tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi pengeluaran untuk non makanan (56,52%) dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan (43,48%).

Tabel 2. Pola Konsumsi Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Muslim di Provinsi Jambi Tahun 2016

Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	% terhadap sub kelompok	% terhadap total
Padi-Padian	278.233	16,59	7,21
Umbi-Umbian	32.530	1,94	0,84
Ikan/udang/Cumi/kerang	157.256	9,37	4,08
Daging	156.887	9,35	4,07
Telur dan Susu	122.277	7,29	3,17
Sayur-Sayuran	188.710	11,25	4,89
Kacang-Kacangan	44.393	2,65	1,15
Buah-Buahan	83.633	4,99	2,17
Minyak dan Lemak	62.797	3,74	1,63
Bahan Minuman	74.563	4,44	1,93
Bumbu-Bumbuan	27.972	1,67	0,72
Konsumsi Lainnya	57.813	3,45	1,50
Makanan dan Minuman Jadi	199.867	11,91	5,18
Tembakau dan Sirih	190.580	11,36	4,94
Total Pengeluaran Makanan	1.677.511	100,00	43,48
Pendidikan	439.149	20,14	11,38
Kesehatan	107.533	4,93	2,79
Rekreasi	172.567	7,91	4,47
Pengeluaran Keagamaan	612.404	28,08	15,87
Pengeluaran Lain Non Makanan	849.121	38,94	22,01
Total Pengeluaran Non Makanan	2.180.774	100,00	56,52
Total Pengeluaran	3.858.285		100,00

Sumber : Hasil Penelitian

Dirinci lebih jauh terhadap pengeluaran untuk makanan pada rumah tangga Muslim di Provinsi Jambi, dapat dikemukakan bahwa secara keseluruhan pengeluaran konsumsi dengan proporsi paling besar adalah untuk padi-padian yang mencapai 16,59 persen. Kelompok padi-padian ini utamanya adalah beras, karena selain sebagai makanan pokok, beras memiliki harga yang relatif murah dibandingkan komoditas kelompok padi-padian lainnya seperti jagung dan tepung terigu serta dapat banyak dijual disekitar rumah masyarakat. Diposisi kedua setelah konsumsi padi-padian adalah konsumsi makanan dan minuman jadi dengan proporsi mencapai 11,91 persen dan konsumsi tembakau dan sirih menempati urutan ketiga dengan proporsi 11,36 persen. Selanjutnya konsumsi untuk sayur-sayuran menempati urutan ke empat dalam konsumsi untuk makanan dengan proporsi 11,25 persen. Secara total, keempat konsumsi dominan ini mencapai 51,11 persen dari total pengeluaran rumah tangga untuk makanan.

Dari hasil pengamatan ada hal yang menarik dari pola konsumsi untuk makanan ini. Alokasi pengeluaran rumah tangga Muslim untuk tembakau (rokok) dan sirih tergolong tinggi dan menempati posisi ke empat. Mengenai konsumsi tembakau atau rokok ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Haram, tetapi kenyataannya konsumsi untuk tembakau ini masih tinggi bagi rumah tangga Muslim di Provinsi Jambi. Denga fakta ini maka penelitian ini mendukung hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Tahun 2003-2005 yang membuktikan, bahwa konsumsi rumah tangga miskin untuk tembakau menduduki peringkat ke-2 (12,43 persen) setelah konsumsi padi-padian (19,30 persen). Selanjutnya untuk jenis-jenis konsumsi makanan lainnya persentase pengeluaran rumah tangga relatif kecil. Dari 11 jenis konsumsi lainnya ini (yang mencakup bahan minuman, minyak, telur dan susu, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, makanan dan minuman jadi, buah-buahan, daging, umbi-umbian, kacang-kacangan dan lainnya) proporsi pengeluaran rumah tangga Muslim untuk keperluan ini mencapai 26,89 persen dari total pengeluaran untuk makanan.

Selanjutnya jika dirinci berdasarkan alokasi pengeluaran non-makanan rumah tangga Muslim di Provinsi Jambi, ternyata pengeluaran non makanan terbesar yaitu ditujukan untuk kepentingan keagamaan yang mencapai 28,08 persen dari total pengeluaran non makanan. Urutan ke dua setelah untuk tujuan keagamaan, yaitu pengeluaran untuk pendidikan, yang mencapai 20,14 persen. Selanjutnya pengeluaran untuk rekreasi mencapai 7,91 persen dari total pengeluaran untuk konsumsi non makanan.

Pengeluaran penting lainnya yang dilakukan oleh rumah tangga Muslim di Provinsi Jambi adalah untuk tujuan keagamaan seperti zakat maal, zakat fitrah, kurban, infak, sedekah, wakaf dan sedekah. Pengeluaran terbesar untuk tujuan keagamaan adalah pengeluaran untuk kurban yang mencapai 52,93 persen dari total pengeluaran untuk keagamaan. Kedua pengeluaran terbesar untuk keagamaan adalah untuk infak, sedekah dan wakaf yang mencapai 19,63 persen dari total pengeluaran untuk keagamaan. Ketiga, pengeluaran penting untuk tujuan keagamaan lainnya adalah untuk pembayaran zakat maal yang mencapai 18,71 persen dari total pengeluaran untuk keagamaan. Porsi pengeluaran untuk zakat maal sebesar 18,71 persen tersebut dapat dikatakan masih rendah. Rendahnya pengeluaran untuk zakat maal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Muslim di Provinsi Jambi untuk membayar zakat maal masih tergolong rendah.

Proporsi pengeluaran untuk tujuan keagamaan masyarakat Muslim di Provinsi Jambi yang mencapai di atas 25 persen pengeluaran untuk kepentingan agama hanya

mencapai 18 persen dari total pengeluaran untuk tujuan keagamaan. Proporsi terbesar pengeluaran untuk keagamaan yang kurang dari 25 persen dari pengeluaran untuk kepentingan keagamaan mencapai 82 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Muslim untuk tujuan kepentingan keagamaan tergolong rendah.

Tabel 3. Pola Konsumsi Masyarakat Muslim Untuk Kepentingan Keagamaan Tahun 2016.

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Rendah	82	54,7
2	Sedang	21	14,0
3	Tinggi	47	31,3
Total		150	100,00

Sumber; Hasil Penelitian

Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Pola Konsumsi Pangan

Dengan data yang ada dan setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan uji *Pearson chi-square*, ternyata hubungan antara jenis pekerjaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan jenis pekerjaan. *Chi-Square Value* 17,967 dengan tingkat signifikansi 0,001. Didasarkan data hasil penelitian didapatkan bahwa keluarga Muslim yang pekerjaannya sebagai petani, proporsi pengeluaran untuk konsumsi mencapai 55 persen. Sedangkan petani yang pengeluaran konsumsi untuk pangan tergolong rendah mencapai 37,5 persen.

Tabel 4. Hubungan Jenis Pekerjaan dan Konsumsi Pangan

Kelompok Jenis Pekerjaan			Pola Konsumsi			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Pekerjaan	Petani	Frekuensi	15	3	22	40
		Persentase	37,5	7,5	55,0	100,0
	PNS	Frekuensi	32	7	6	45
		Persentase	71,1	15,6	13,3	100,0
	Swasta/Wiraswasta	Frekuensi	35	11	19	65
		Persentase	53,8	16,9	29,2	100,0
Total		Frekuensi	82	21	47	150
		Persentase	54,7	14,0	31,3	100,0

Sumber : Hasil Penelitian

Keluarga Muslim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagian besar yaitu 71,1 persen mempunyai proporsi pengeluaran untuk konsumsi tergolong rendah. Sedangkan proporsi pengeluaran PNS untuk konsumsi pangan yang tergolong sedang hanya 15,6 persen. Sisanya sebesar 13,3 persen PNS mempunyai pengeluaran untuk pangan tergolong tinggi. Keluarga Muslim yang pekerjaannya swasta, mempunyai proporsi pengeluaran untuk pangan yang tergolong rendah sebesar 53,8 persen. Sedangkan jumlah pekerja swasta yang mempunyai proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan dalam kategori sedang hanya 16,9 persen. Selanjutnya rumah tangga yang pekerjaannya swasta dengan proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan tergolong tinggi mencapai 29,2 persen.

Hubungan Pendidikan Kepala Keluarga Dengan Konsumsi Pangan

Hasil pengujian data analisis menunjukkan *Chi-Square Value* 17,206 dan tingkat

signifikansi 0,046. Dari hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan keterkaitan atau hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengeluaran untuk konsumsi pangan. Kepala keluarga Muslim yang berpendidikan rendah cenderung membelanjakan pendapatannya untuk konsumsi pangan lebih tinggi. Keluarga yang berpendidikan SD ternyata 60,7 persen mempunyai pengeluaran untuk konsumsi yang tergolong tinggi. Tingkat pengeluaran untuk konsumsi pangan yang tergolong rendah sebanyak 8 orang atau 28,6 persen. Selanjutnya yang berpendidikan SD dengan proporsi pengeluaran untuk konsumsi dalam kategori sedang hanya 10,7 persen. Keluarga Muslim yang berpendidikan SLTP dengan pengeluaran untuk konsumsi pangan yang tergolong tinggi mencapai 47,1 persen. Sedangkan yang tergolong dengan pengeluaran untuk konsumsi pangan rendah adalah 35,3 persen.

Bagi keluarga Muslim yang berpendidikan SLTA dengan pengeluaran untuk pangan yang tergolong rendah mencapai 59,3 persen. Selanjutnya yang mempunyai pengeluaran untuk pangan tergolong tinggi sebesar 25,9 persen.

Keluarga dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (sarjana) ternyata sebagian besar (70,6 persen) pengeluaran untuk konsumsi pangan tergolong rendah. Hanya 15,7 persen keluarga muslim dengan tingkat pendidikan PT yang mempunyai pengeluaran untuk konsumsi pangan tergolong tinggi. Pengeluaran untuk konsumsi pangan yang tergolong sedang bagi keluarga yang berpendidikan tinggi hanya 13,7 persen.

Tabel 5. Hubungan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga dan Konsumsi Pangan Keluarga Muslim di Provinsi Jambi Tahun 2016

Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga			Pola Konsumsi			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Pendidikan	SD	Frekuensi	8	3	17	28
		Persentase	28,6	10,7	60,7	100,0
	SLTP	Frekuensi	6	3	8	17
		Persentase	35,3	17,6	47,1	100,0
	SLTA	Frekuensi	32	8	14	54
		Persentase	59,3	14,8	25,9	100,0
PT	Frekuensi	36	7	8	51	
	Persentase	70,6	13,7	15,7	100,0	
Total		Frekuensi	82	21	47	150
		Persentase	54,7	14,0	31,3	100,0

Sumber : Hasil Penelitian

Dari data dan hasil pembahasan di atas dan dengan pengujian Pearson chi-square terbukti bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin rendah proporsi pengeluarannya untuk konsumsi pangan. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikannya, maka akan semakin tinggi proporsi pengeluarannya untuk konsumsi pangan.

Hubungan Pendapatan Dengan Konsumsi Pangan

Teori Keynes (Makiw. 2012) menyatakan bahwa makin tinggi pendapatan, maka akan semakin kecil atau rendah proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan. Dari data yang ada dan hasil pengujian menunjukkan bahwa, nilai *Chi-Square Value* adalah 59,272 dengan tingkat signifikansi 0,000.

Tabel 6. Hubungan Pendapatan dan Pengeluaran Untuk Konsumsi Pangan.

Tingkat Pendapatan			Pola Konsumsi			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Kelompok pendapatan	<2 juta	Frekuensi	5	8	30	43
		Persentase	11,6	18,6	69,8	100,0
	2 juta – 4 juta	Frekuensi	33	11	12	56
		Persentase	58,9	19,6	21,4	100,0
	> 4 juta	Frekuensi	44	2	5	51
		Persentase	86,3	3,9	9,8	100,0
Total		Frekuensi	82	21	47	150
		Persentase	54,7	14,0	31,3	100,0

Sumber : Hasil Penelitian

Dari data yang ada terlihat bahwa dengan tingkat pendapatan di bawah Rp. 2 juta, ternyata pengeluaran untuk konsumsi pangan yang tergolong tinggi meliputi 30 orang atau 69,8 persen. Pengeluaran konsumsi pangan bagi keluarga Muslim yang berpendapatan antara Rp. 2 juta sampai Rp. 4 juta ternyata yang mempunyai pengeluaran untuk konsumsi pangan tinggi hanya 12 orang atau 21,4 persen dan sebagian besar 58,9 persen tergolong rendah. Bagi keluarga Muslim yang berpenghasilan di atas Rp. 4 juta pengeluaran untuk konsumsi pangan sebagian besar yaitu 86,4 persen tergolong rendah dan hanya 9,8 persen yang pengeluarannya untuk konsumsi pangan tergolong tinggi. Dari hasil pengamatan ini terbukti bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin rendah proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan.

Keterkaitan Tingkat Keimanan Dan Pola Konsumsi

Untuk menelusuri lebih lanjut tentang keterkaitan antara tingkat keimanan dan pola konsumsi telah dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Chi-Square Value* adalah 18,610 dengan tingkat signifikansi 0,001.

Tabel 7. Hubungan Tingkat Keimanan dengan Pola Konsumsi Pangan

Tingkat Keimanan			Pola Konsumsi			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Kelompok tingkat Keimanan	Rendah	Frekuensi	8	3	15	26
		Persentase	30,8	11,5	57,7	100,0
	Sedang	Frekuensi	48	16	28	92
		Persentase	52,2	17,4	30,4	100,0
	Tinggi	Frekuensi	26	2	4	32
		Persentase	81,3	6,3	12,5	100,0
Total		Frekuensi	82	21	47	150
		Persentase	54,7	14,0	31,3	100,0

Sumber : Hasil Penelitian

Dari hasil analisis data yang terlihat pada Tabel 7. dapat dijelaskan bahwa masyarakat Muslim yang tergolong dengan tingkat keimanan rendah mengeluarkan pendapatannya untuk konsumsi tergolong tinggi (57,7 persen). Hanya 30,8 persen keluarga Muslim yang tergolong keimanan rendah yang pengeluarannya untuk konsumsinya rendah. Selanjutnya masyarakat Muslim dengan tingkat keimanan sedang,

ternyata proporsi pengeluaran untuk konsumsi yang tergolong rendah cukup tinggi yaitu 52,2 persen dan proporsi pengeluaran untuk konsumsi tergolong rendah sebesar 30,4 persen.

Keluarga Muslim yang tergolong mempunyai tingkat keimanan tinggi ternyata proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan, tergolong rendah yaitu mencapai 81,3 persen. Proporsi pengeluaran untuk konsumsi tergolong sedang bagi keluarga Muslim yang mempunyai tingkat keimanan tinggi sebesar 6,3 persen. Proporsi pengeluaran keluarga Muslim yang mempunyai tingkat keimanan tinggi dan pengeluaran konsumsi pangan juga tergolong tinggi hanya 12,5 persen. Dari hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa makin tinggi tingkat keimanan seseorang maka akan semakin rendah proporsi pengeluarannya untuk konsumsi.

Jenis Pekerjaan dan Pengeluaran Untuk Keagamaan

Dari hasil analisis diketahui bahwa jenis pekerjaan berhubungan erat dengan pengeluaran untuk keagamaan. Hasil analisis menunjukkan nilai *Pearson Chi-Square Value* yaitu 6,284 dengan signifikansi 0,392. Dari hasil uji tersebut dapat dijelaskan bahwa jenis pekerjaan berhubungan erat dengan pengeluaran untuk keagamaan. Dilihat dari jenis pekerjaan rumah tangga Muslim sebagai petani terlihat bahwa sebanyak 16 keluarga atau 40 persen mengeluarkan pendapatan untuk keagamaan sekitar 15 – 25 persen dari pengeluaran total untuk non pangan. Hanya 7 keluarga yang proporsi pengeluaran untuk kegiatan keagamaan lebih dari 25 persen.

Bagi keluarga dengan pekerjaan sebagai PNS, ternyata proporsi pengeluaran untuk kegiatan keagamaan dapat dikatakan merata. Jumlah keluarga yang proporsi pengeluaran kurang dari 5 persen, antara 5 – 15 persen, antara 15 – 25 persen dan lebih dari 25 persen pengeluaran untuk kepentingan agama masing-masing yaitu 10 keluarga (22,2 persen), 12 keluarga (26,7 persen), 11 keluarga (24,4 persen dan 12 keluarga (26,7 persen).

Bagi keluarga yang pekerjaannya wiraswasta atau di perusahaan swasta, ternyata proporsi pengeluaran untuk kegiatan keagamaan lebih rendah dibandingkan dengan petani. Proporsi pengeluaran yang berkerja sebagai wiraswasta atau di perusahaan swasta, ternyata pengeluaran untuk keagamaan kurang dari 5 persen sebanyak 17 keluarga atau 26,2 persen. Angka tersebut lebih besar dari petani atau yang kerja di perusahaan swasta. Proporsi pengeluarannya antara 15 – 25 persen sebanyak 40 keluarga atau 61,6 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa para wiraswasta maupun yang bekerja di swasta proporsi pengeluarannya untuk keagamaan lebih rendah dibandingkan dengan petani dan PNS.

Tabel 8. Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Proporsi Pengeluaran Keagamaan

Jenis Pekerjaan			Kelompok Proporsi Keagamaan				Total
			<= 5,00%	5,01% - 15,00%	15,01% - 25,00%	> 25,00 %	
Kelompok Pekerjaan	Petani	Frekuensi	6	11	16	7	40
		Persentase	15,0%	27,5%	40,0%	17,5%	100,0%
	PNS	Frekuensi	10	12	11	12	45
		Persentase	22,2%	26,7%	24,4%	26,7%	100,0%
	Swasta/Wiraswasta	Frekuensi	17	20	20	8	65
		Persentase	26,2%	30,8%	30,8%	12,3%	100,0%
Total		Frekuensi	33	43	47	27	150
		Persentase	22,0%	28,7	31,3	18,0	100,0

Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Untuk Keagamaan

Seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teori bahwa tingkat pendidikan seseorang mempunyai hubungan dengan pengeluaran untuk ibadah atau keagamaan. Dari hasil analisis statistik diketahui bahwa *Chi-Square Value* yaitu 21,179 dan tingkat signifikansi 0,002. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa untuk keluarga Muslim dengan tingkat pendidikan SD dan SLTP, proporsi pengeluaran untuk keagamaan cenderung rendah. Untuk tingkat pendidikan SD proporsi pengeluaran untuk kegiatan keagamaan di atas 25 persen hanya 6 orang atau 21,4 persen, antara 15 persen hingga 25 persen hanya 7 orang (25 persen) dan kurang dari 5 persen sebanyak 9 orang atau 32,1 persen. Selanjutnya untuk yang berpendidikan SLTP, proporsi pengeluaran untuk keagamaan di atas 25 persen hanya 2 orang atau 11,8 persen. Keluarga yang berpendidikan SLTP lebih dominan (41,2 persen) mengeluarkan pendapatan untuk kegiatan keagamaan antara 15 – 25 persen dari pendapatannya. Proporsi pengeluaran untuk keagamaan antara 5 – 15 persen sebanyak 5 orang atau 29,4 persen.

Jika pada keluarga Muslim yang berpendidikan SLTP proporsi pengeluarannya di atas 25 % dari pendapatannya untuk keagamaan, tetapi untuk keluarga yang berpendidikan SLTA ternyata proporsi pengeluaran untuk keagamaan di atas 25 persen dari pengeluarannya hanya 3 orang atau 5,6 persen. Jumlah keluarga yang mempunyai pengeluaran untuk keagamaan antara 15 – 25 persen dari pengeluaran non makanan lebih dominan yaitu sebanyak 38,9 persen. Proporsi pengeluaran untuk keagamaan antara 5 – 15 persen dan kurang dari 5 persen masing-masing sebanyak 16 orang atau 29,6 persen dan 25,9 persen.

Untuk keluarga Muslim yang berpendidikan Perguruan Tinggi proporsi pengeluaran untuk kegiatan keagamaan cenderung lebih besar. Pengeluaran untuk keagamaan lebih dari 25 persen sebanyak 31,4 persen dari jumlah keluarga yang ada Selanjutnya proporsi pengeluaran untuk keagamaan sekitar 15 – 25 persen dari total pengeluaran non makanan sebanyak 12 orang (31,4 persen) dari jumlah keluarga yang ada. Sisanya yaitu 7 orang (13,7 persen) mempunyai pengeluaran untuk keagamaan kurang dari 5 persen dari pengeluaran total non makanan.

Tabel 9. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Proporsi Pengeluaran Keagamaan

Tingkat Pendidikan			Kelompok Proporsi Keagamaan				Total	
			<= 5,00%	5,01% - 15,00%	15,01% - 25,00%	> 25,00 %		
Kel.pend	SD	Frekuensi	9	6	7	6	28	
		Persentase	32,1	21,4	25,0	21,4	100,0	
	SLTP	Frekuensi	3	5	7	2	17	
		Persentase	17,6	29,4	41,2	11,8	100,0	
	SLTA	Frekuensi	14	16	21	3	54	
		Persentase	25,9	29,6	38,9	5,6	100,0	
	PT	Frekuensi	7	16	12	16	51	
		Persentase	13,7	31,4	23,5	31,4	100,0	
	Total		Frekuensi	33	43	47	27	150
			Persentase	22,0%	28,7	31,3	18,0	100,0

Hubungan Tingkat Pendapatan Dengan Proporsi Pengeluaran Keagamaan

Dari hasil pengujian secara statistik keterkaitan antara pendapatan dan pengeluaran keagamaan diperoleh *Chi-Square Value* 29,307 dan tingkat signifikansi 0,000. Keluarga Muslim yang mempunyai penghasilan atau pendapatan kurang dari Rp. 2 juta cenderung mengeluarkan pendapatannya kurang dari 25 persen dari pengeluaran non makanan. Jumlah keluarga yang berpendapatan kurang dari Rp. 2 juta dengan proporsi pengeluaran keagamaan kurang dari 5 persen sebanyak 14 orang (32,6%) dan proporsi pengeluaran untuk keagamaan antara 15 – 25 persen dari total pengeluaran non pangan sebanyak 15 orang (34,9 persen). Hanya 3 orang atau 7 persen keluarga muslim yang berpenghasilan kurang dari RP. 2 juta yang proporsi pengeluaran untuk kegiatan keagamaan di atas 25 persen dari total pengeluaran non makanan. Untuk keluarga yang berpendapatan antara Rp. 2 juta – Rp. 4 juta, jumlah keluarga yang mengeluarkan pendapatannya antara 15 – 25 persen orang sebanyak 24 orang atau 42,9 persen. Proporsi pengeluaran untuk keagamaan di atas 25 persen dari pengeluaran non pangan hanya 4 orang (7,1 persen).

Tabel 10. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Proporsi Pengeluaran Untuk Keagamaan

Kelompok Pendapatan			Kelompok Proporsi Agama				Total
			<= 5,00%	5,01% - 15,00%	15,01% - 25,00%	> 25,00 %	
Kedapat	<2 juta	Frekuensi	14	11	15	3	43
		Persentase	32,6	25,6	34,9	7,0	100,0
	2 juta – 4 juta	Frekuensi	11	17	24	4	56
		Persentase	19,6	30,4	42,9	7,1	100,0
	> 4 juta	Frekuensi	8	15	8	20	51
		Persentase	15,7	29,4	15,7	39,2	100,0
Total		Frekuensi	33	43	47	27	150
		Persentase	22,0	28,7	31,3	18,0	100,0

Untuk keluarga yang mempunyai pendapatan di atas Rp. 4 juta maka pengeluaran untuk kegiatan keagamaan di atas 25 persen dari pengeluaran non pangan berjumlah 20 orang atau 39,2 persen. Pengeluaran dengan proporsi antara 15 – 25 persen untuk kegiatan keagamaan dari keluarga yang mempunyai pendapatan di atas Rp. 4 juta berjumlah 8 orang atau 15,7 persen. Proporsi pengeluaran untuk keagamaan antara 5 – 15 persen dari total pengeluaran non pangan berjumlah 15 orang atau 29,4 persen. Proporsi pengeluaran untuk keagamaan kurang dari 5 persen pengeluaran non pangan hanya 8 orang atau 15,7 persen.

Tingkat Keimanan Dan Proporsi Pengeluaran Keagamaan

Keimanan berhubungan kuat dengan pengeluaran untuk keagamaan. Makin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin tinggi atau besar pengeluarannya untuk keimanan keagamaan. Dari hasil analisis dan pengujian secara statistik dengan uji *Pearson chi-square*, diperoleh informasi bahwa tingkat keimanan berhubungan erat dengan pengeluaran untuk kegiatan keagamaan dengan *Chi-Square Value* 10,824 dan tingkat signifikansi 0,094.

Tabel 11. Hubungan Tingkat Keimanan dengan Proporsi Pengeluaran Keagamaan

Tingkat Keimanan			Kelompok Proporsi Pengeluaran Keagamaan				Total
			<= 5,00%	5,01% - 15,00%	15,01% - 25,00%	> 25,00 %	
Kelompok Tingkat Keimanan	Rendah	Frekuensi	9	6	9	2	26
		Persentase	34,6	23,1	34,6	7,7	100,0
	Sedang	Frekuensi	18	30	30	14	92
		Persentase	19,6	32,6	32,6	15,2	100,0
	Tinggi	Frekuensi	6	7	8	11	32
		Persentase	18,8	21,9	25,0	34,4	100,0
Total		Frekuensi	33	43	47	27	150
		Persentase	22,0	28,7	31,3	18,0	100,0

Berdasar hasil analisis ditemukan bahwa keluarga Muslim yang tergolong tingkat keimanan rendah mempunyai tingkat pengeluaran untuk keagamaan kurang dari 5 persen dari total pengeluaran non pangan cenderung lebih banyak yaitu 9 orang atau 34,6 persen. Selanjutnya proporsi pengeluaran untuk keagamaan di atas 25 persen bagi keluarga dengan tingkat keimanan rendah hanya berjumlah 2 orang dari total responden (7,7 persen).

Bagi keluarga dengan kategori tingkat keimanan sedang, ternyata proporsi pengeluaran di atas 25 persen dari total pengeluaran non pangan hanya 14 keluarga atau 15,2 persen. Proporsi pengeluaran untuk keagamaan antara 5 – 25 persen dari total pengeluaran non pangan bagi keluarga yang tergolong tingkat keimanan sedang berjumlah 60 keluarga atau 65,2 persen. Sedangkan pengeluaran keluarga dengan tingkat keimanan sedang dengan proporsi pengeluaran untuk keagamaan kurang dari 5 persen berjumlah 18 keluarga atau 19,6 persen.

Bagi kelompok keluarga Muslim dengan kategori keimanan tinggi, ternyata jumlah keluarga yang mengeluarkan pendapatan di atas 25 persen dari total pengeluaran non pangan untuk keagamaan berjumlah 11 keluarga (34,4 persen). Proporsi pengeluaran untuk keagamaan antara 5 – 25 persen bagi keluarga dengan kategori keimanan tinggi berjumlah 15 orang atau 46,9 persen. Selanjutnya proporsi pengeluaran untuk keagamaan kurang dari 5 persen bagi keluarga yang tergolong tingkat keimanan tinggi hanya 6 keluarga atau 18,8 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, maka dari hasil pembahasan tersebut dapat disampaikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Rata-rata pengeluaran keluarga Muslim di Provinsi Jambi untuk pangan per bulan adalah Rp. 1.677.511 dan proporsi untuk pangan ini mencapai 43,48 persen dari total pengeluaran keluarga.
2. Pengeluaran untuk non pangan keluarga Muslim di Provinsi Jambi rata-rata sebesar

Rp. 2.180.774 per bulan dengan proporsi mencapai 56,52 persen dari total pengeluaran.

3. Tingkat pendidikan, pendapatan, tingkat keimanan keluarga Muslim di Jambi mempunyai hubungan yang kuat dengan pengeluaran untuk pangan. Semakin tinggi pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan, maka proporsi pengeluaran untuk pangan cenderung semakin rendah.
4. Tingkat pendidikan, pendapatan, tingkat keimanan keluarga Muslim di Provinsi Jambi mempunyai hubungan yang kuat dengan pengeluaran untuk keagamaan. Semakin tinggi pendidikan, pendapatan dan tingkat keimanan, maka proporsi pengeluaran untuk keagamaan cenderung semakin tinggi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada rumah tangga Muslim yang mempunyai kegiatan dalam organisasi keagamaan, karena itu perlu dikembangkan pada seluruh keluarga Muslim tanpa memperhatikan keterlibatannya dalam organisasi keagamaan.
2. Tingkat aktivitas keagamaan dan keimanan rumah tangga Muslim yang diteliti tergolong rendah, karena itu masih perlu kerja keras untuk bagi Dai untuk meningkatkannya.
3. Pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan peningkatan pengeluaran untuk keagamaan, karenanya peningkatan pendidikan umat harus terus diupayakan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan keimanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (edisi terjemahan). Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.
- Al-Ghazali. (1937). *Ihya 'Ulumal-Din*. Dar Al-Nadwah. Beirut.
- Amir, Amri. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Rafikatama, Pustaka Muda.
- Junaidi, J. (2010). *Prosedur Uji Chi-Square*. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
- Junaidi, J. (2010). *Statistika Non-Parametrik*. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
- Kahf, Monzer (1982). *Economic Views of Ibn Taimiyah' in Universal Message*, Karachi, vol. 4, No. 2, 3. Published in *al Ittihad*, Plainfield, Indiana, 1977.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. K.H. Ma'ruf Amin dkk. Penerbit Erlangga
- Manan, Muhammad Abdul. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (edisi terjemahan). Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.
- Mankiw, N. Gregory. (2012). *Makro Ekonomi*. Alih Bahasa Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Erlangga. Jakarta.
- Qardhawi, Syekh Yusuf. (1997). *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta. Robbani Press.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta Gema Insani Press.

Todaro, Michael P. (2000). *Economics Development*. Fifth Edition. Longman, New York. London.

Sharif Chaudhry. (2012). *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Indonesia.